

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015-2017

Putri Okti Andriani

Program Studi D3 Akuntansi

STIE Putra Bangsa Kebumen

putrioktiandriani95@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2017 dilihat dari Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi, Rasio Kesenjangan, dan Rasio Pertumbuhan. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan pengumpulan data menggunakan metode data sekunder yang diambil dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan BPKAD Kabupaten Kebumen dilihat dari Rasio Efektivitas PAD terhadap kinerja keuangan Kabupaten Kebumen sangat efektif karena rata-rata efektivitasnya diatas 100%. Rasio Keuangan Daerah cukup efisien karena rata-rata dibawah 100%. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong sangat rendah sekali dan pola hubungannya instruktif karena rasio tersebut masih dibawah 25%. Rasio Belanja Operasi daerah rata-rata masih sangat tinggi dibandingkan belanja modal. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah masih memprioritaskan belanja operasi dibandingkan belanja modal. Rasio Pertumbuhannya masih mengalami fluktuasi pendapatan pada periode 2015-2017.

Kata kunci: Otonomi Daerah, Kinerja Keuangan Daerah, Analisis Rasio Keuangan

Abstract

This study to determined the financial performance of Kebumen Regency in 2015-2017 seen from the regional financial independence ratio, effectiveness ratio of origional local government revenue (PAD), efficiency ratio, harmony ratio, and growth ratio. This study used quantitative data and data collection used was secondary data methods taken from Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kebumen Regency. The results of this study indicated that the financial performance of the Kebumen Regency BPKAD seen from PAD ratio effectiveness on the financial performance of Kebumen Regency has been effective because the average effectiveness is above 100%. Regional financial ratio is efficient because the average is below 100%. The regional financial independence ratio is classified as very low and relationships pattern is instructive because the ratio is still below 25%. Regional operating expenditure ratio was still very high compared to capital expenditure. So it can be concluded that local government still prioritizes operating expenditures compared to capital expenditure. Growth ratio still experiences income fluctuations in the period of 2015-2017.

Keywords: Regional Autonomy, Local Financial Performance, Financial Ratio Analysis

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015-2017

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Daerah sebagai Undang-Undang yang mengatur otonomi daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penerapan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia tercermin dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik juga didasarkan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantu.

Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi yaitu berupa penyerahan urusan, tugas, dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undang yang berlaku.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonomi terletak pada kemampuan mengelola keuangan daerah, artinya otonom daerah harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai persyaratan mendasar sistem pemerintah daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya. Fungsi dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan

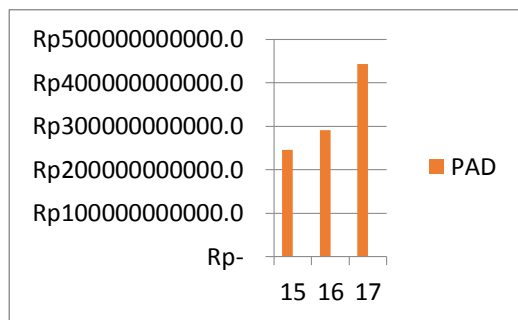
laporan keuangan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, akan tetapi masih banyak pihak yang belum memahami atau dapat membaca laporan keuangan dengan baik. Hal tersebut wajar, karena berbagai pihak yang berkepentingan tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda dan tidak memahami akuntansi. Padahal mereka sangat membutuhkan informasi keuangan tersebut untuk pembuatan keputusan, oleh karena itu dibutuhkan analisis laporan keuangan untuk membantu mereka. Dalam menganalisis suatu laporan keuangan dapat menggunakan metode-metode dan salah satunya yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio.

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten Kebumen antara lain: (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang tercermin dalam bantuan pemerintah pusat baik sudut dari anggaran rutin maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, (2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan pendapatan transfer, (3) kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada, (4) inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah.

Dengan adanya otonomi daerah, Kabupaten Kebumen memikul tugas untuk memberikan suatu inovasi didalam sistem pemerintahan daerah yang lebih baik untuk menjadi lebih mandiri didalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan dan nonkeuangan pemerintahannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat bahkan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kebumen dituntut untuk dapat mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015-2017

secara baik demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Grafik I.1 Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2015-2017

Sumber: BPKAD Kabupaten Kebumen

Berdasarkan grafik I.1 terlihat bahwa terjadi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2017, hal tersebut belum menjamin bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen ini sudah baik atau tidak, untuk itu perlu dilakukannya pengukuran kinerja keuangan terhadap APBD Kabupaten Kebumen. Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolok ukur untuk peningkatan kinerja khususnya pemerintah daerah pada periode berikutnya, karena itu Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah Kabupaten Kebumen berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak, untuk itu masyarakat atas penduduk sebagai salah satu sumber daya pembangunan yang memegang dua peran penting dalam pembangunan yaitu sebagai objek atau perilaku sekaligus sebagai objek pembangunan menginginkan adanya transparansi anggaran keuangan yang ada pada pemerintah Kabupaten Kebumen, sehingga masyarakat atau penduduk juga

dapat memantau kinerja pemerintah Kabupaten Kebumen berjalan dengan baik atau tidak.

Pengelolaan keuangan dilaksanakan dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah di era otonomi yaitu terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu diterapkannya standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk itu diperlukannya suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolok ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya, karena itu pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah untuk dinilai apakah pemerintah Kabupaten Kebumen berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Analisis kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kebumen adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan BPKAD Kabupaten Kebumen dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2017”.

2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah tersebut, maka dalam hal ini penulis merumuskan yang menjadi permasalahan didalam penelitian ini adalah: Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen selama tiga tahun terakhir (Tahun 2015-

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015-2017

2017) dengan menggunakan analisis rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.

3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen selama tiga tahun terakhir (Tahun 2015-2017) dengan menggunakan analisis rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio keserasian, rasio pertumbuhan.

4.1 Batasan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini akan dibatasi pada pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen dengan menggunakan indikator analisis rasio keuangan pada LRA, yaitu: rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.

5.1 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pacuan informasi bagi publik dan sebagai tambahan referensi pada penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2017.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengkajian dan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam hal kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan referensi diperpustakaan STIE Putra Bangsa tentang kinerja keuangan pemerintah daerah khususnya Kabupaten Kebumen.

d. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang baik untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen baik jangka panjang maupun jangka pendek.

e. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kebumen

Dapat dijadikan sebagai alternatif masukan untuk mengukur dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, baik jangka panjang maupun jangka pendek.

B. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5 tentang pemerintah daerah, definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Halim (2013:01) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berisi tentang perlunya dilaksanakan otonomi daerah,

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015-2017

sehingga undang-undang tersebut sering disebut dengan Undang-Undang otonomi daerah. Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakat menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan perundang-undang yang berlaku.

2.2 Asas Otonomi Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah dilaksanakan berdasarkan asas, ada beberapa asas penting dalam Undang-Undang otonomi daerah yang perlu dipahami berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, terdiri dari:

1. Asas Desentralisasi
2. Asas Dekonsentrasi
3. Asas Tugas Pembantu

Sedangkan menurut Bastian (2006:338), asas otonomi daerah terdiri dari 4 asas yaitu:

1. Asas Desentralisasi
2. Asas Dekonsentrasi
3. Asas Tugas Pembantu
4. Asas Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

2.3 Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah Pasal 2 Ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonom yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang urusan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Adapun tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan masyarakat yang lebih baik
2. Pengembangan kehidupan demokrasi

3. Keadilan nasional
4. Pemerataan wilayah daerah
5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI
6. Mendorong pemberdayaan masyarakat
7. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

2.4 Keuangan Daerah

Berdasarkan Permedagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

Beberapa pokok-pokok muatan peraturan pemerintahan yang mencangkup, yaitu sebagai berikut Mahsun (2010:46):

1. Perencanaan dan Penganggaran
2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 6 Ayat 1 APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah.

Menurut Halim (2013:33) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015-2017

- a. Fungsi Otorisasi
- b. Fungsi Pengawasan
- c. Fungsi Alokasi
- d. Fungsi Distribusi
- e. Fungsi Stabilisasi

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Standar Akuntansi Pemerintahan, struktur APBD dalam Halim (2013:34) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
3. Dana Pembiayaan

2.6 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi keuangan, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan SKPD adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi keuangan dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Laporan keuangan pemerintah daerah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi serta membantu ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 komponen yang terdapat pada laporan keuangan pemerintah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Catatan atas Laporan Keuangan
4. Laporan Arus Kas

2.7 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Bastian (2006:274) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Secara umum kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Kinerja keuangan merupakan suatu alat ukur untuk mengetahui kemampuan daerah dalam melakukan otonomi daerah. Kinerja dapat diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu organisasi atau instansi selama periode tertentu sebagai bagian dari keberhasilan.

Penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD. Selanjutnya dalam penilaian indikator kinerja sekurang-kurangnya ada empat tolok ukur penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu:

1. Penyimpanan antara realisasi anggaran dengan target yang ditetapkan dalam APBD
2. Efisiensi Biaya
3. Efektivitas Program
4. Pemerataan dan Keadilan

2.8 Elemen Pokok Pengukuran Kinerja

Menurut Mahsun (2010:158), elemen pokok suatu pengukuran kinerja antara lain:

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015-2017

1. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi
2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja
3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi
4. Evaluasi kinerja (*feedback*, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas)

2.9 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan, yaitu:

1. Memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerah
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.10 Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2008:232) kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

2.11 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Ada beberapa cara untuk mengukur kinerja keuangan daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan rasio kinerja keuangan daerah. Beberapa rasio yang digunakan antara lain:

1. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan

dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rumus rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}}$$

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan seluruh sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan jumlah PAD yang telah ditargetkan. Pemerintah daerah dikatakan mampu menjalankan tugasnya apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100%, tetapi semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik. Rasio efektivitas perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah.

Tabel.1 Kriteria Efektifitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektifitas	Presentase Efektifitas (%)
Sangat Efektif	>100%
Efektif	90% - 99,99%
Cukup Efektif	80% - 89,99%
Kurang Efektif	60% - 79,99%
Tidak Efektif	<60%

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 dalam Herry & Avrina (2014)

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio efisiensi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi PAD}}$$

Kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien jika rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015-2017

Tabel.2 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Kriteria Efisiensi	Presentase Efisiensi (%)
Tidak Efisien	>100%
Kurang Efisien	90% - 99,99%
Cukup Efisien	80% - 89,99%
Efisien	60% - 79,99%
Sangat Efisien	<60%

Sumber: Halim (2007:234)

Tabel.3 Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Daerah

Kemampuan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 24,99%	Instruktif
Rendah Sedang	25% - 49,99%	Konsultatif
Sedang Tinggi	50% - 69,99%	Partisipatif
Tinggi	70% - 100%	Delegatif

Sumber: Halim (2007:169)

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya (pendapatan transfer) seperti bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}}$$

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal (pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan semakin sebaliknya.

- Pola hubungan Instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- Pola hubungan Konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- Pola hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- Pola hubungan Delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

4. Rasio Keserasian Belanja

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti presentase Belanja Pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2012:8). Ada 2 perhitungan dalam rasio keserasian ini, yaitu: Rasio Belanja Modal, dan Rasio Belanja Operasi.

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015-2017

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Menurut Mahmudi (2010) dalam Pramita (2015:15) menyatakan pada umumnya proposi belanja operasi lebih dominan total belanja modal. Rasio Belanja Operasi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

b. Belanja Modal

Rasio Belanja Modal, Pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Menurut Mahmudi (2010) dalam Pramita (2015:15) rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Rasio belanja modal dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Belum ada standar yang pasti berapa besarnya rasio belanja operasi maupun belanja modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

5. Rasio Pertumbuhan

Menurut Puspitasari (2014:05) Rasio Pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah

daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode.

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin tinggi presentase pertumbuhan pendapatan, maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode. Rasio pertumbuhan pendapatan dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Pertumbuhan PAD} &= \frac{\text{Realisasi Pendapatan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Pendapatan PAD } X_{n-1}} \\ \text{Rasio Pertumbuhan } \sum \text{Pendapatan} &= \frac{\text{Realisasi Pendapatan } \sum \text{Pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Pendapatan } \sum \text{Pendapatan } X_{n-1}} \\ \text{Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan} &= \frac{\text{Realisasi Belanja Pembangunan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Pembangunan PAD } X_{n-1}} \end{aligned}$$

Keterangan:

X_n = Tahun yang dihitung

X_{n-1} = Tahun sebelumnya

Menurut Halim (2007:241), Rasio pertumbuhan yang semakin tinggi nilai Total Pendapatan daerah, PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh kegiatan pembangunan dan investasi semakin rendahnya belanja operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015-2017

meningkatkan pertumbuhan dari periode yang satu ke periode berikutnya.

2.12 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumadewi & Ilat (2016) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2014”. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam mengelola APBD tahun 2012-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam mengelola pendapatannya dikatakan baik ini dibuktikan dari varians pendapatan yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu merealisasikan pendapatannya melebihi dari yang telah dianggarkan. Kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran belanja dikatakan baik ini dilihat dari tidak adanya realisasi belanja yang melebihi dari yang dianggarkan.

Penelitian yang dilakukan Pramono (2014) dengan judul “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2010-2011 serta untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas Pemerintah Kota Surakarta dalam mengelola sumber dayanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta yang masih kurang adalah di aspek kemandirian dan aspek keserasian, tingkat efisiensi dan efektifitas pemerintah Kota Surakarta dalam mengelola dana sudah sangat efisien dan efektif, dan kemampuan melunasi pinjaman masih mencukupi.

Penelitian yang dilakukan Pandjaitan *et al* (2018) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2011-2016”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah

Kota Manado tahun 2011-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata derajat desentralisasi masih sangat rendah, rasio ketergantungan keuangan daerah masih tinggi, rasio kemandirian keuangan daerah dengan pola konsultatif, rasio belanja operasi terhadap total belanja mendominasi alokasi belanja dibandingkan rasio belanja modal terhadap total belanja dan rasio efisiensi belanja kurang efisien.

C. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kebumen, Jl. Pahlawan No. 138, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

3.2 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka yang dapat diukur dan dapat dilakukan perhitungan terlebih dahulu agar menjadi suatu informasi. Selanjutnya, data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder berupa data yang telah ada dari dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Kebumen terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun 2015-2017 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kebumen.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, data yang digunakan berupa arsip dokumen pada bagian keuangan yang berupa data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kebumen. Dari hasil Laporan Realisasi Anggaran tersebut nantinya akan diketahui bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2015-2017.

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015-2017

3.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Menyajikan data-data yang sesuai dengan kinerja keuangan.
- b. Menghitung kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang mencakup beberapa berdasarkan rasio, yaitu sebagai berikut:

1. Rasio Efektivitas PAD

Menggambarkan kemampuan Kabupaten Kebumen dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Kebumen semakin baik. Dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel.4 Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektivitas	Presentase Efektif (%)
Sangat Efektif	>100%
Efektif	90% - 99,99%
Cukup Efektif	80% - 89,99%
Kurang Efektif	60% - 79,99%
Tidak Efektif	<60%

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 dalam Herry & Avrina (2014)

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah:

Rasio Efisiensi

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel.5 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Kriteria Efisiensi	Presentase Efisiensi (%)
Tidak Efisien	>100%
Kurang Efisien	90% - 99,99%
Cukup Efisien	80% - 89,99%
Efisien	60% - 79,99%
Sangat Efisien	<60%

Sumber: Halim (2007:234)

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Semakin tinggi kemandirian daerah, tingkat ketergantungannya terhadap bantuan pihak eksternal (Pemerintah Pusat/Provinsi) semakin rendah dan sebaliknya. Rumus rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Rasio Kemandirian

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel.6 Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Daerah

Kemampuan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 24,99%	Instruktif
Rendah	25% - 49,99%	Konsultatif
Sedang	50% - 69,99%	Partisipatif
Tinggi	70% - 100%	Delegatif

Sumber: Halim (2007:169)

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015-2017

4. Rasio Kesenjangan Belanja

Belanja Operasi = $\frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$
Belanja Modal = $\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$

Belum ada standar yang pasti berapa besarnya rasio belanja operasi maupun belanja modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

5. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besarnya kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

Realisasi Penerimaan
$PAD = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_{n-1}}$
Rasio Pertumbuhan Σ Pendapatan = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan } \Sigma \text{ Pendapatan } X_{n-1}}$
Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan = $\frac{\text{Realisasi Belanja Pembangunan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Pembangunan PAD } X_{n-1}}$

Keterangan:

$X_n = \text{Tahun yang dihitung}$	$X_{n-1} = \text{Tahun sebelumnya}$
Tahun 2015	Tahun 2014
Tahun 2016	Tahun 2015
Tahun 2017	Tahun 2016

Menurut Halim (2007:241) Rasio Pertumbuhan yang semakin tinggi nilai total pendapatan daerah, PAD, dan belanja modal yang diikuti semakin rendahnya belanja operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya.

D. HASIL LAPORAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam merealisasikan pendapatan asli daerah ditunjukkan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Tabel. 7 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas BPKAD Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2017

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	REPAD (%)	Kriteria
2015	245.159.255.421	221.657.039.000	110,60%	Sangat Efektif
2016	291.016.321.703	273.228.579.000	106,51%	Sangat Efektif
2017	443.608.862.461	437.608.862.461	101,43%	Sangat Efektif

Sumber: Data Sekunder Diolah (2019)

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015-2017

Berdasarkan perhitungan Rasio Efektivitas PAD bahwa pada tahun 2015 efektivitas sebesar 110,60% dengan kriteria sangat efektif, hal ini disebabkan pendapatan asli daerah (PAD) yang direalisasikan lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan. Tahun 2016 efektivitas mengalami penurunan sebesar 4,09% menjadi 106,51% dengan kriteria sangat efektif. Hal ini disebabkan pendapatan asli daerah pada retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan. Retribusi daerah turun menjadi Rp 25.432.356.619,- dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan turun menjadi Rp 6.895.862.950,- namun dalam hal ini pendapatan asli daerah (PAD) yang direalisasikan lebih tinggi dibandingkan pendapatan asli daerah yang ditargetkan. Tahun 2017 efektivitas mengalami penurunan kembali sebesar 5,14% menjadi 101,43% dengan kriteria sangat efektif. Hal ini disebabkan pendapatan asli daerah pada retribusi daerah mengalami penurunan, retribusi turun menjadi Rp 22.655.157.693,- namun dalam hal ini pendapatan asli daerah (PAD) yang direalisasikan lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan.

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD tersebut dapat dikatakan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2017 sangat efektif, karena nilai prosentase efektivitas yang diperoleh sudah lebih dari 100%. Pemerintah Kabupaten Kebumen juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan, namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, pemerintah daerah harus tetap mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatan yang telah ada.

4.2 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam merealisasikan pendapatan asli daerah ditunjukkan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel.8 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2017

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	REPA D (%)	Kriteria
2015	2.033.106.110.204	2.326.188.256.641	87,40%	Cukup Efisien
2016	2.283.531.796.631	2.606.209.824.034	87,62%	Cukup Efisien
2017	2.113.132.464.285	2.713.113.397.677	77,89%	Efisien

Sumber: Data Sekunder Diolah (2019)

Berdasarkan perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah pada tahun 2015 efisiensi keuangan daerah sebesar 87,40% dengan kriteria cukup efisien, hal ini disebabkan total pendapatan daerah yang direalisasikan lebih tinggi dibandingkan total belanja daerah yang direalisasikan. Tahun 2016 efisiensi keuangan daerah mengalami kenaikan sebesar 0,22% menjadi 87,62% dengan kriteria cukup efisien. Hal ini disebabkan total pendapatan daerah pada pendapatan pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan. Pendapatan pajak daerah naik menjadi Rp 62.838.508.061,- dan lain-lain PAD yang sah naik menjadi Rp 195.849.594.073,- total belanja daerah pada belanja barang dan jasa naik menjadi Rp 344.031.356.716,- belanja bantuan sosial naik menjadi Rp 43.193.146.690,- belanja tanah naik menjadi Rp 27.333.513.581,- belanja peralatan dan mesin naik menjadi Rp 99.178.874.603,- belanja gedung dan bangunan naik menjadi Rp 160.882.989.465,- belanja jalan, irigasi,

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015-2017

dan jaringan naik menjadi Rp 360.609.773.795,- belanja aset tetap lainnya naik menjadi Rp 1.583.361.300,- dan belanja aset tetap tak berwujud naik menjadi Rp 114.590.000,- namun dalam hal ini total pendapatan daerah yang direalisasikan lebih tinggi dibandingkan total belanja daerah yang direalisasikan. Tahun 2017 efisiensi keuangan daerah mengalami penurunan sebesar 9,73% menjadi 77,89% dengan kriteria efisien. Hal ini disebabkan total pendapatan daerah pada retribusi daerah mengalami penurunan menjadi Rp 22.655.157.693,- total belanja daerah pada belanja pegawai turun menjadi Rp 1.134.490.482.085,- belanja tanah turun menjadi Rp 8.413.326.479,- belanja peralatan dan mesin turun menjadi Rp 97.896.891.582,- belanja gedung dan bangunan turun menjadi Rp 81.049.491.600, belanja jalan, irigasi, dan jaringan turun menjadi Rp 229.346.847.905,- belanja aset tak berwujud turun menjadi Rp 19.640.500,- namun dalam hal ini total pendapatan daerah yang direalisasikan lebih tinggi dibandingkan total belanja daerah yang direalisasikan.

4.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Transfer Pusat Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel IV.9 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian BPKAD Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2017

Tahun	Realisasi PAD	Transfer	RK KD (%)	Pola Hubungan
2015	245.159.255.421	2.059.880.470.220	11,9 0%	Instruktif
2016	291.016.321.703	2.321.163.281.331	12,5 4%	Instruktif
2017	443.608.862.461	2.264.290.535.216	19,5 9%	Instruktif

Sumber: Data Sekunder Diolah (2019)

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah bahwa pada tahun 2015 kemandirian keuangan daerah sebesar 11,90% dengan pola hubungan instruktif. Hal ini disebabkan pendapatan transfer yang direalisasikan lebih tinggi dibandingkan pendapatan asli daerah (PAD) yang direalisasikan. Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,64% menjadi 12,54% dengan pola hubungan instruktif. Hal ini disebabkan pendapatan asli daerah pada pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan. Pajak daerah naik menjadi Rp 62.838.508.061,- lain-lain PAD yang sah naik menjadi Rp 195.849.594.073,- pendapatan transfer pemerintah pusat mengalami kenaikan menjadi Rp 1.771.732.786,- namun dalam hal ini pendapatan transfer yang direalisasikan lebih tinggi dibandingkan pendapatan asli daerah (PAD) yang direalisasikan. Tahun 2017 mengalami kenaikan kembali sebesar 7,05% menjadi 19,59% dengan pola hubungan instruktif. Hal ini disebabkan pendapatan asli daerah pada pajak daerah naik menjadi Rp 79.479.454.753,- pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik menjadi Rp 21.901.327.127,- dan lain-lain PAD yang sah naik menjadi Rp 319.572.922.888,- pendapatan transfer pada bagi hasil pajak mengalami kenaikan menjadi Rp 38.555.872.539,- namun dalam hal ini pendapatan transfer yang direalisasikan lebih tinggi dibandingkan pendapatan daerah yang direalisasikan.

Menurut uraian dan perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2017 secara keseluruhan dapat dikatakan masih sangat rendah. Hal ini menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana dari pusat masih sangat tinggi, ini dapat dibuktikan dari rasio kemandirian keuangan daerah masih tergolong dalam interval 0%-25% dengan pola hubungan

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015-2017**

instruktif, yaitu pemerintah pusat lebih dominan dari pada pemerintah daerahnya.

dibandingkan belanja operasi yang direalisasikan.

4.4 Rasio Keserasian

a. Belanja Operasi

$$\text{Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel.10 Hasil
Perhitungan Rasio Keserasian BPKAD
Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2017
(Belanja Operasi)**

Tahun	Total Belanja	Realisasi Belanja Operasi	Rasio Belanja Operasi (%)
2015	2.033.106.110.204	1.564.935.277.492	76,97%
2016	2.283.531.796.631	1.632.755.658.513	71,50%
2017	2.113.132.464.285	1.678.033.681.238	79,41%

Sumber: Data Sekunder Diolah (2019)

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Keserasian Belanja Operasi pada tahun 2015 sebesar 76,97%, hal ini disebabkan total belanja daerah yang direalisasikan lebih tinggi dibandingkan belanja operasi yang direalisasikan. Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 5,47% menjadi 71,50%, hal ini disebabkan belanja operasi pada belanja hibah mengalami penurunan menjadi Rp 35.289.065.833,- namun dalam hal ini realisasi total belanja daerah yang direalisasikan lebih tinggi dibandingkan belanja operasi yang direalisasikan. Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 7,91% menjadi 79,41%, hal ini disebabkan belanja operasi pada belanja barang dan jasa naik menjadi Rp 452.644.541.214,- belanja hibah naik menjadi Rp 45.614.321.177,- dan belanja bantuan sosial naik menjadi Rp 45.284.336.762,- namun dalam hal ini total belanja daerah yang direalisasikan lebih tinggi

b. Belanja Modal

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

**Tabel. 11 Hasil Perhitungan
Rasio Keserasian Kabupaten
Kebumen Tahun 2015-2017
(Belanja Modal)**

Tahun	Total Belanja	Realisasi Belanja Modal	Rasio Belanja Modal (%)
2015	2.033.106.110.204	468.153.450.416	23,03%
2017	2.283.531.796.631	649.703.102.744	28,45%
2018	2.113.132.464.285	433.698.055.660	20,52%

Sumber: Data Sekunder Diolah (2019)

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Keserasian Belanja Modal bahwa pada tahun 2015 sebesar 23,03%, hal ini disebabkan total belanja daerah yang direalisasikan lebih tinggi dibandingkan belanja modal yang direalisasikan. Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 5,43% menjadi 28,45%, hal ini disebabkan belanja modal pada belanja tanah naik menjadi Rp 27.333.513.581,- belanja peralatan dan mesin naik menjadi Rp 99.178.874.603,- belanja gedung dan bangunan naik menjadi Rp 160.882.989.465,- belanja jalan, irigasi, dan jaringan naik menjadi Rp 360.609.773.795,- namun dalam hal ini total belanja daerah yang direalisasikan lebih tinggi dibandingkan belanja modal yang direalisasikan. Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 7,93% menjadi 20,52%, hal ini disebabkan belanja modal pada belanja tanah mengalami penurunan menjadi Rp 8.413.326.479,- belanja peralatan dan

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015-2017

mesin turun menjadi Rp 97.896.891.582,- belanja gedung dan bangunan turun menjadi Rp 81.049.491.600,- belanja jalan, irigasi, dan jaringan turun menjadi Rp 229.346.847.905,- belanja aset tak berwujud turun menjadi Rp 19.640.500,- namun dalam hal ini total belanja daerah yang direalisasikan lebih tinggi dibandingkan belanja modal yang direalisasikan.

Menurut uraian dan perhitungan pada Rasio Keserasian Belanja Operasi dan Belanja Modal kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2017 belum stabil dalam keserasian belanja operasi dan belanja modal. Hal ini disebabkan sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah Kabupaten Kebumen masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga belanja modal masih relatif kecil. Hal ini dikarenakan belum ada standar yang pasti untuk belanja modal, sehingga pemerintah Kabupaten Kebumen masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk pemerintah Kabupaten Kebumen relatif kecil.

4.5 Rasio Pertumbuhan Pendapatan

**Tabel IV.12 Hasil Perhitungan
Rasio Pertumbuhan pada
Pemerintah Kabupaten
Kebumen Tahun 2015-2017**

Tahun	Rasio Pertumbuhan berdasarkan Realisasi PAD	Rasio Pertumbuhan berdasarkan Realisasi Pendapatan	Rasio Pertumbuhan berdasarkan Realisasi Belanja Pembangunan
2015	1,27%	18,26%	0,51%
2016	18,71%	12,04%	38,78%
2017	52,43%	4,10%	-33,25%

Sumber: Data Sekunder Diolah (2019)

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Pertumbuhan pada Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2015 sebesar 1,27%, hal ini disebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direalisasikan tahun sebelumnya. Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 17,43% menjadi 18,71%, hal ini disebabkan pendapatan asli daerah pada pajak daerah mengalami kenaikan menjadi Rp 62.838.508.061,- lain-lain pendapatan yang sah naik menjadi Rp 195.849.594.073,- namun dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direalisasikan tahun sebelumnya. Tahun 2017 mengalami kenaikan kembali sebesar 33,73%, hal ini disebabkan pendapatan asli daerah pada pajak daerah mengalami kenaikan menjadi Rp 79.479.454.753,- pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik menjadi Rp 21.901.327.127,- dan lain-lain PAD yang sah naik menjadi Rp 319.572.922.888,- namun dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direalisasikan tahun sebelumnya.

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Pertumbuhan pada Realisasi Penerimaan Pendapatan tahun 2015 sebesar 18,26%, hal ini disebabkan total penerimaan pendapatan yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan penerimaan pendapatan yang direalisasikan tahun sebelumnya. Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 6,22% menjadi 12,04%, hal ini disebabkan pendapatan asli daerah (PAD) pada retribusi daerah mengalami penurunan menjadi Rp 25.432.356.619,- dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan turun menjadi Rp

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015-2017

6.895.862.950,- namun dalam hal ini total penerimaan pendapatan yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan total penerimaan pendapatan yang direalisasikan tahun sebelumnya. Tahun 2017 mengalami penurunan kembali sebesar 7,94% menjadi 4,10%, hal ini disebabkan pendapatan asli daerah (PAD) pada retribusi daerah mengalami penurunan menjadi Rp 22.655.157.693,- namun dalam hal ini total penerimaan pendapatan yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan total penerimaan pendapatan yang direalisasikan tahun sebelumnya.

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Pertumbuhan pada Realisasi Belanja Pembangunan tahun 2015 sebesar 0,51%, hal ini disebabkan belanja modal yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan belanja modal yang direalisasikan tahun sebelumnya. Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 38,27% menjadi 38,78%, hal ini disebabkan belanja modal pada belanja tanah mengalami kenaikan menjadi Rp 27.333.513.581,- belanja peralatan dan mesin naik menjadi Rp 99.178.874.603,- belanja gedung dan bangunan naik menjadi Rp 160.882.989.465,- belanja jalan, irigasi, dan jaringan naik menjadi Rp 360.609.773.795,- namun dalam hal ini belanja modal yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan belanja modal yang direalisasikan tahun sebelumnya. Tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup drastis sebesar 72,03% menjadi -33,25%, hal ini disebabkan belanja modal pada belanja tanah mengalami penurunan menjadi Rp 8.413.326.479,- belanja peralatan dan mesin turun menjadi Rp 97.896.891.582,- belanja gedung dan bangunan turun menjadi Rp 81.049.491.600,- belanja jalan, irigasi, dan jaringan turun menjadi Rp 294.407.086.000,- dan belanja aset tak berwujud turun menjadi Rp 19.640.500,-

namun dalam hal ini belanja modal yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih kecil dibandingkan belanja modal yang direalisasikan tahun sebelumnya.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat digambarkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2017 adalah sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah tahun 2015-2017 sebagai berikut:

Tabel.13 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Tahun 2015-2017

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	REPA D (%)	Kriteria
2015	245.159.255.421	221.657.039.000	110,60 %	Sangat Efektif
2016	291.016.321.703	273.228.579.000	106,51 %	Sangat Efektif
2017	443.608.862.461	437.608.862.461	101,43 %	Sangat Efektif

Sumber: Data Sekunder Diolah (2019)

Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam merealisasikan pendapatan asli daerah sudah sangat efektif, terbukti selama periode tahun 2015-2017 tiga tahun berturut-turut realisasi pendapatan asli daerah selalu melebihi target. Hal ini disebabkan pendapatan asli daerah yang direalisasikan lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah yang ditargetkan.

2. Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tahun 2015-2017 sebagai berikut:

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015-2017

Tabel.14 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Tahun 2015-2017

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	REP AD (%)	Kriteria
2015	2.033.106.110.204	2.326.181.8256.64	87,40 %	Cukup Efisien
2016	2.283.531.796.631	2.606.209.824.034	87,62 %	Cukup Efisien
2017	2.113.132.464.285	2.713.113.397.677	77,89 %	Efisien

Sumber: Data Sekunder Diolah (2019)

Pemerintah Kabupaten Kebumen cukup efisien dalam merealisasikan pendapatannya, karena biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan lebih besar dari capaian pendapatan itu sendiri.

3. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tahun 2015-2017 sebagai berikut:

Tabel.15 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Tahun 2015-2017

Tahun	Realisasi PAD	Transfer	RK KD (%)	Pola Hubungan
2015	245.159.255.421	2.059.880.470.220	11,9 0%	Instruktif
2016	291.016.321.703	2.321.163.281.331	12,5 4%	Instruktif
2017	443.608.862.461	2.264.290.535.216	19,5 9%	Instruktif

Sumber: Data Sekunder Diolah (2019)

Pola hubungan kemandirian daerah Kabupaten Kebumen dalam tiga tahun terakhir masih menunjukkan pola hubungan *Instruktif* dimana peranan pemerintah pusat

lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah.

4. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Kecerassian Tahun 2015-2017 sebagai berikut:

Tabel.16 Hasil Perhitungan Rasio Kecerassian (Belanja Operasi) Tahun 2015-2017

Tahun	Total Belanja	Realisasi Belanja Operasi	Rasio Belanja Operasi (%)
2015	2.033.106.110.204	1.564.935.277.492	76,97%
2016	2.283.531.796.631	1.632.755.658.513	71,50%
2017	2.113.132.464.285	1.678.033.681.238	79,41%

Sumber: Data Sekunder Diolah (2019)

Tabel.16 Hasil Perhitungan Rasio Kecerassian (Belanja Modal) Tahun 2015-2017

Tahun	Total Belanja	Realisasi Belanja Modal	Rasio Belanja Modal (%)
2015	2.033.106.110.204	468.153.450.416	23,03%
2016	2.283.531.796.631	649.703.102.744	28,45%
2017	2.113.132.464.285	433.698.055.660	20,52%

Sumber: Data Sekunder Diolah (2019)

Berdasarkan kinerja pemerintah Kabupaten Kebumen dapat dinilai belum optimal dalam keserasian belanja. Ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan porsi belanjannya untuk belanja operasi dibandingkan pada belanja modal.

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015-2017

5. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan Tahun 2015-2017 sebagai berikut:

Tabel.17 Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Tahun 2015-2017

Tahun	Rasio Pertumbuhan berdasarkan Realisasi PAD (%)	Rasio Pertumbuhan berdasarkan Realisasi Penerimaan Pendapatan Σ (%)	Rasio Pertumbuhan berdasarkan Realisasi Belanja Pembangunan (%)
2015	1,27%	18,25%	0,51%
2016	18,71%	12,04%	38,77%
2017	52,43%	4,10%	-33,24%

Sumber: Data Sekunder Diolah (2019)

Berdasarkan Rasio Pertumbuhan dilihat dari sisi Realisasi PAD mengalami kenaikan, namun hal ini Pemerintah Kabupaten Kebumen belum mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2015-2017. Untuk Rasio Pertumbuhan dilihat dari sisi Realisasi Penerimaan Pendapatan mengalami penurunan, penurunan tersebut disebabkan turunnya pendapatan retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan Rasio Pertumbuhan dilihat dari sisi Realisasi Belanja Pembangunan mengalami kenaikan dan penurunan, terbukti pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang dipengaruhi oleh belanja modal pada belanja tanah, belanja gedung dan bangunan, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan. Pada tahun 2017 mengalami penurunan disebabkan turunnya belanja modal pada belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tak berwujud.

2. Saran

Pemerintah Kabupaten Kebumen sebaiknya:

1. Tetap meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan daerahnya dengan meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya..
2. Pemerintah lebih menekankan belanja operasinya kebelanja modal, supaya dapat tumbuh menjadi kabupaten yang mandiri.
3. Pemerintah mempunyai insiatif dan kemauan dalam upaya meningkatkan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.
4. Pemerintah lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh masyarakat. Karena pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat. Salemba Empat. Jakarta.
- Kusumadewi, W, N. & Venjte, I. 2016. Analisis Kinerja Pada Pemerintah Daerah Minahasa Utara Tahun 2012-2014. *Jurnal EMBA* 4(1).

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015-2017

- Mahsun, M. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Pandjaitan, M., F. Parengkuan, T. Dan Victoria N, Untu. 2018. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2011-2016. *Jurnal EMBA* 6(3).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo 84 Tahun 2000 *tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah*. Jakarta.
- _____. Nomor 24 Tahun 2005 *tentang Laporan Arus Kas*.
- _____. Nomor 58 tahun 2005 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Pramita, P. R. 2015. Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Pramono, Joko. 2014. Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta. *Jurnal Among Makarti* 7(13):83.
- Puspitasari, A. F. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011. *Skripsi*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Siregar, Baldric. 2017. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Soedarsa, G, H. & Avrina, T, D, P. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung. *Jurnal Akuntansi & Keuangan* 5(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 *tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- _____. Nomor 25 Tahun 1999 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta.
- _____. Nomor 32 tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- _____. Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta.
- _____. Nomor 17 Tahun 2003 *tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.